

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung dan berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu kekuatan utama yang mengubah politik, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia. Perkembangan teknologi telekomunikasi, khususnya jaringan 5G, telah menjadi sorotan utama dalam industri teknologi global. Perkembangan ini menjanjikan konektivitas yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih luas daripada generasi sebelumnya, membuka pintu bagi inovasi besar dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan elektronik.

Teknologi komunikasi 5G adalah generasi kelima dari jaringan komunikasi seluler yang menawarkan peningkatan signifikan dalam kecepatan, latensi rendah, kapasitas jaringan, dan efisiensi energi dibandingkan dengan pendahulunya, 4G. Dengan kecepatan hingga 100 kali lebih cepat daripada 4G, teknologi 5G membuka peluang besar dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, kesehatan, manufaktur, hingga pertahanan. Selain itu, jaringan ini dirancang untuk mendukung konektivitas perangkat yang masif, memungkinkan pengembangan *Internet of Things* (IoT) dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Fan, 2021).

Perkembangan 5G sangat signifikan karena teknologi ini menjadi tulang punggung revolusi digital berikutnya. Di bidang ekonomi, 5G diproyeksikan akan mendorong transformasi digital dalam industri-industri utama, seperti otomatisasi pabrik, kendaraan otonom, dan layanan kesehatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Di sektor kesehatan, misalnya, 5G memungkinkan operasi jarak jauh yang sangat presisi, sementara di sektor transportasi, teknologi ini menjadi fondasi bagi kendaraan tanpa pengemudi (Christensen, 2019). Selain itu, 5G juga menjadi kunci untuk mendukung konsep smart cities, yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup warga kota.

Namun, pentingnya teknologi 5G tidak hanya terletak pada manfaat ekonomi dan sosialnya, tetapi juga pada implikasinya dalam diskursus hubungan internasional. Teknologi ini telah menjadi arena baru dalam persaingan geopolitik, terutama antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sebagai pemimpin global dalam pengembangan infrastruktur 5G, perusahaan China seperti Huawei telah menjadi pusat kontroversi karena dituduh menggunakan teknologi ini untuk kepentingan pengawasan dan spionase. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di banyak negara tentang risiko keamanan nasional, terutama di kalangan sekutu AS, seperti Inggris, Jepang, dan Australia (Segal, 2020).

Dalam konteks hubungan internasional, 5G mencerminkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat kekuatan dan pengaruh. Realisme, misalnya, menyoroti pentingnya penguasaan teknologi sebagai bentuk kekuasaan negara untuk mempertahankan dominasi di bawah kondisi anarki global. Dalam hal ini,

dominasi dalam pengembangan dan penyebaran 5G memberikan keunggulan strategis, termasuk akses ke data, kontrol infrastruktur komunikasi global, dan kemampuan untuk memproyeksikan pengaruh ekonomi serta politik. Persaingan antara AS dan China dalam 5G, misalnya, mencerminkan upaya untuk menguasai sektor strategis yang dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan global (Mearsheimer, 2001).

Namun, 5G juga menghadirkan risiko yang tidak dapat diabaikan. Selain kekhawatiran keamanan terkait spionase, ada juga isu tentang ketergantungan pada infrastruktur yang dimiliki oleh negara tertentu, yang dapat menciptakan ketidakstabilan. Misalnya, jika negara-negara sangat bergantung pada teknologi Huawei, mereka mungkin menghadapi tekanan politik atau ekonomi dari China, terutama dalam situasi krisis (Herscovitch, 2021). Oleh karena itu, beberapa negara Barat telah mengadopsi kebijakan diversifikasi pemasok teknologi 5G untuk mengurangi risiko strategis.

Secara keseluruhan, teknologi 5G tidak hanya merupakan kemajuan dalam bidang komunikasi, tetapi juga mencerminkan perubahan mendalam dalam hubungan internasional. Teknologi ini telah menjadi simbol persaingan geopolitik, alat diplomasi teknologi, dan peluang untuk memperkuat kerja sama multilateral. Pengembangan 5G menjadi titik temu antara inovasi teknologi dan dinamika politik global, yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk tata dunia di abad ke-21.

Dalam konteks ini, perusahaan teknologi terkemuka seperti Huawei Co. Ltd, yang berbasis di China, telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendorong evolusi teknologi 5G. Huawei telah berhasil mencapai posisi terdepan dalam pengembangan teknologi 5G, menawarkan solusi infrastruktur yang canggih dan terjangkau kepada pasar global. Namun, kesuksesan Huawei dalam mengembangkan teknologi 5G tidak terlepas dari tantangan dan kontroversi, terutama dalam hubungannya dengan AS.

Huawei memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah China, meskipun perusahaan ini berulang kali menegaskan bahwa mereka adalah entitas swasta yang independen. Huawei didirikan oleh Ren Zhengfei, seorang mantan insinyur militer di *The People's Liberation Army (PLA)*, yang menimbulkan persepsi bahwa perusahaan ini memiliki ikatan dengan militer China. Seiring dengan berkembangnya Huawei menjadi raksasa teknologi global, hubungannya dengan pemerintah China semakin mendapat perhatian, terutama dari negara-negara Barat yang khawatir bahwa Huawei bisa digunakan sebagai alat untuk kepentingan geopolitik dan intelijen China (Fan, 2021).

Dukungan pemerintah China terhadap Huawei dapat terlihat melalui sejumlah kebijakan yang memungkinkan perusahaan ini berkembang pesat, termasuk dalam bentuk subsidi dan akses khusus ke pasar domestik yang sangat besar. Selain itu, Huawei juga mendapat manfaat dari kebijakan pemerintah China yang mengutamakan pengembangan teknologi tinggi dan mendorong perusahaan-perusahaan China untuk menjadi pemimpin di pasar global. Dukungan ini memberikan Huawei daya saing yang besar dalam industri

teknologi, terutama di bidang jaringan 5G, di mana Huawei menjadi salah satu pemimpin dunia. Namun, hubungan dekat dengan pemerintah China inilah yang menimbulkan kecurigaan di beberapa negara, khususnya AS dan sekutunya, yang melihat keberhasilan Huawei sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional mereka (Christensen, 2019).

Pada tahun 2018, AS mulai meningkatkan kampanye globalnya untuk menghalangi penggunaan teknologi Huawei di jaringan 5G, dengan alasan keamanan nasional. AS melarang Huawei dari infrastruktur komunikasi kritisnya dan menekan sekutu-sekutunya untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, Australia dan Jepang mengikuti jejak AS dengan melarang Huawei dalam proyek 5G mereka, karena kekhawatiran akan kemungkinan adanya backdoor dalam perangkat Huawei yang memungkinkan pemerintah China untuk melakukan pengawasan terhadap data yang dikirimkan melalui jaringan tersebut (Herscovitch, 2021). Di Eropa, reaksi terhadap tuduhan ini lebih beragam. Beberapa negara Eropa, seperti Jerman, tetap membuka pintu untuk Huawei dengan persyaratan ketat, sementara yang lain, seperti Inggris, akhirnya memutuskan untuk melarang Huawei dari jaringan 5G mereka setelah mengalami tekanan diplomatik dari AS.

Namun, hingga kini, tidak ada bukti konkret yang membuktikan bahwa Huawei terlibat dalam spionase atas nama pemerintah China. Beberapa akademisi dan pakar teknologi berpendapat bahwa kekhawatiran tentang spionase Huawei lebih terkait dengan persaingan geopolitik dan perdagangan antara China dan AS. Pendapat ini didukung oleh argumen bahwa Huawei

menjadi sasaran utama AS karena keberhasilan perusahaan tersebut di pasar 5G global mengancam dominasi perusahaan teknologi Barat. Hal ini menambah ketegangan dalam perang dagang dan persaingan teknologi antara kedua negara, di mana Huawei menjadi simbol dominasi teknologi China yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di bidang teknologi global (Jiang & Ling, 2020).

AS, sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi terkemuka di dunia, telah mengadopsi pendekatan yang ketat terhadap Huawei dan perusahaan teknologi China lainnya. Persaingan antara AS dan China dalam bidang teknologi dan perdagangan telah mencapai puncaknya, dengan perang dagang yang intensif dan saling bertambahnya tindakan pembatasan. Salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh persaingan ini adalah perdagangan elektronik.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi 5G yang dipimpin oleh Huawei telah memengaruhi dinamika perdagangan elektronik antara AS dan Republik Rakyat China. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan perdagangan hingga isu-isu keamanan teknologi dan privasi data.

Masalah terkait pengaruh inovasi teknologi 5G oleh Huawei terhadap kebijakan perdagangan AS-China terutama berakar pada kekhawatiran AS terhadap keamanan nasional. Teknologi 5G yang dikembangkan Huawei sangat penting bagi infrastruktur komunikasi, namun AS menilai bahwa hubungan erat perusahaan ini dengan pemerintah China menimbulkan risiko keamanan seperti

potensi spionase. Oleh karena itu, AS memberlakukan larangan teknologi Huawei dan mengeluarkan kebijakan yang membatasi akses Huawei ke teknologi AS. Larangan ini bertujuan untuk mencegah dominasi teknologi Huawei, yang dianggap bisa memperkuat posisi China dalam persaingan global dan mengancam dominasi teknologi AS di dunia internasional.

Langkah AS menentang Huawei telah meningkatkan ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua negara, menimbulkan apa yang disebut sebagai "perang teknologi." Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral AS-China, tetapi juga berdampak pada sekutu-sekutu AS, yang beberapa di antaranya mengikuti langkah yang sama, yaitu pembatasan teknologi Huawei di wilayah mereka demi menjaga aliansi strategis dengan AS. Dengan demikian, persaingan teknologi 5G ini tidak hanya soal ekonomi tetapi juga geopolitik, di mana AS berupaya mempertahankan dominasi dan pengaruhnya dalam struktur kekuatan internasional melalui pembatasan atas Huawei. Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif tentang topik ini diperlukan untuk mengungkap dampak dan implikasi dari perkembangan tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada Pengaruh inovasi teknologi 5G perusahaan Huawei Co.Ltd terhadap kebijakan perdagangan telekomunikasi AS ke China pada era akhir periode pertama pemerintahan Donald Trump dan periode pemerintahan Joe Biden

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengaruh inovasi teknologi Huawei Co.Ltd terhadap kebijakan perdagangan AS
2. Bagaimana respon China terhadap kebijakan perdagangan AS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yakni:

- a) Untuk menyelidiki pengaruh inovasi teknologi 5G yang dilakukan oleh Huawei Co. Ltd terhadap kebijakan perdagangan telekomunikasi AS Rke China
- b) Untuk mengetahui respon China terhadap kebijakan pelarangan Huawei di AS

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Dapat berkontribusi terhadap perkembangan Studi Hubungan Internasional di masa yang akan datang.
- b) Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional maupun mahasiswa di bidang keilmuan lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap dinamika

perdagangan Huawei dan China dengan AS dan beserta dampaknya.

D. Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan tiga konsep yakni kepentingan nasional, keamanan siber, dan perang dagang untuk menjelaskan variabel topik yang akan diteliti. Berikut adalah uraian mengenai konsep dan teori tersebut

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah kompas utama yang mengarahkan segala kebijakan luar negeri negara di arena internasional. Konsep ini menyoroti bahwa setiap negara akan selalu berupaya untuk melindungi dan memajukan kepentingannya sendiri, terutama dalam hal keamanan, kedaulatan, dan kekuasaan. Bagi kaum realis, politik internasional adalah dunia yang keras dan penuh persaingan, di mana tidak ada otoritas global yang dapat menjamin keamanan setiap negara (Mearsheimer, 2001). Oleh sebab itu, setiap negara, menurut teori ini, harus mengandalkan kekuatan dan strategi mereka sendiri untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian global.

Dalam pandangan realis, keamanan adalah inti dari kepentingan nasional. Teori ini percaya bahwa tujuan utama negara adalah memastikan kelangsungan hidupnya di dunia yang anarkis. Konsep ini menegaskan bahwa karena tidak ada jaminan keamanan dari otoritas internasional, setiap negara akan fokus mempertahankan kedaulatan dan melindungi wilayah serta rakyatnya dari

ancaman luar (Waltz, 1979). Dengan kata lain, negara akan selalu mengutamakan keamanan sebagai prioritas pertama dalam kebijakan luar negerinya. Negara-negara akan berupaya membangun kekuatan militer, mengamankan aliansi strategis, dan berperan dalam kompetisi kekuatan demi mencegah potensi ancaman dari negara lain

Selain keamanan, realisme menekankan pentingnya kekuatan dan keseimbangan kekuatan sebagai bagian tak terpisahkan dari kepentingan nasional. Teori ini memandang bahwa setiap negara selalu berusaha untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruhnya agar dapat bersaing di panggung internasional. Menurut Morgenthau (1948), kekuasaan adalah alat utama bagi negara untuk mempertahankan dan mencapai kepentingannya, termasuk keamanan. Negara akan meningkatkan kemampuan militer, ekonomi, dan diplomatiknya agar tidak didominasi atau dikendalikan oleh negara lain. Dalam sistem internasional yang kompetitif, negara harus siap menghadapi ancaman dengan memperhitungkan keseimbangan kekuatan, yaitu upaya menjaga distribusi kekuatan agar tidak terjadi dominasi oleh satu negara yang terlalu kuat.

Selain itu, kedaulatan dan otonomi adalah elemen penting dalam kepentingan nasional dari sudut pandang realisme. Bagi kaum realis, negara selalu berusaha mempertahankan hak eksklusif untuk membuat keputusan tanpa campur tangan pihak luar. Kedaulatan adalah fondasi bagi kepentingan nasional, yang memungkinkan negara untuk mengontrol wilayah, sumber daya, dan rakyatnya sesuai dengan aturan yang diinginkannya sendiri (Waltz, 1979). Dalam pandangan ini, negara akan sangat berhati-hati untuk mempertahankan

otonomi dalam hubungan internasional, dan seringkali bersikap waspada terhadap bentuk-bentuk intervensi atau pengaruh eksternal yang dapat membahayakan integritas politik dan ekonomi mereka.

Realisme juga menyoroti bahwa aktor negara adalah rasional dan bertindak atas dasar kepentingan diri. Artinya, keputusan-keputusan negara didorong oleh perhitungan rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan yang ada. Keputusan-keputusan ini umumnya didasarkan pada kalkulasi yang realistis dan pragmatis, dengan tujuan utama memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Menurut Mearsheimer (2001), negara bertindak sebagai aktor yang rasional dalam lingkungan yang penuh persaingan dan mengambil langkah-langkah yang dirasa paling efektif dalam memperjuangkan kepentingannya, meskipun terkadang tindakan tersebut mungkin tidak populer di mata komunitas internasional.

Secara keseluruhan, dalam perspektif realisme, kepentingan nasional adalah inti dari politik internasional, yang menggambarkan bagaimana negara-negara bertindak demi bertahan hidup, mengamankan kekuasaan, dan mempertahankan kedaulatan di tengah ketidakpastian dunia. Negara selalu siap untuk bertindak secara egois dan protektif demi mencapai tujuan ini, karena sistem internasional dianggap tidak memberi jaminan perlindungan atau stabilitas yang permanen. Sebagaimana diuraikan oleh Waltz (1979), teori ini menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor yang benar-benar dapat diandalkan untuk melindungi dan mempertahankan diri di dunia yang penuh persaingan ini

2. Keamanan Siber

Dalam teori realisme, keamanan siber dianggap sebagai salah satu komponen penting dari strategi pertahanan negara dalam era modern. Bagi kaum realis, dunia internasional adalah arena yang anarkis, di mana tidak ada otoritas global yang benar-benar dapat menjamin keamanan setiap negara. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, ancaman terhadap keamanan negara kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui jaringan siber yang dapat menjadi medan perang baru. Keamanan siber, dalam perspektif realisme, adalah tentang melindungi kepentingan nasional dari serangan siber yang bisa merusak infrastruktur vital, mengacaukan stabilitas ekonomi, atau mencuri informasi penting yang berkaitan dengan keamanan negara (Liff, 2012).

Dalam pandangan realis, ancaman siber adalah ancaman yang nyata dan perlu dihadapi dengan pendekatan defensif maupun ofensif. Serangan siber dapat dilakukan dari mana saja, tanpa perlu ada perbatasan fisik, dan dampaknya bisa sangat destruktif, menyerang langsung ke inti infrastruktur yang menopang kehidupan modern suatu negara. Keamanan siber, dalam konteks ini, bertujuan untuk menjaga ketahanan nasional dengan melindungi jaringan komunikasi, sistem energi, sektor finansial, hingga data pemerintah. Negara-negara yang kuat di bidang siber akan memiliki kemampuan lebih besar untuk bertahan dari serangan eksternal, menjaga stabilitas internal, dan memperkuat posisi mereka di panggung internasional (Nye, 2010).

Menurut perspektif realisme, kekuatan siber adalah bentuk kekuatan baru yang menentukan dalam persaingan antarnegara. Negara dengan kemampuan

siber yang canggih tidak hanya dapat melindungi dirinya, tetapi juga memiliki daya tawar lebih besar dalam hubungan internasional. Dengan memiliki kapabilitas siber ofensif, suatu negara bisa mengganggu, mencuri, atau bahkan melumpuhkan sistem digital negara lain, yang pada gilirannya memperkuat posisi negara tersebut di arena global (Libicki, 2009). Kekuatan siber memberikan alat bagi negara untuk mempertahankan keamanan nasionalnya sambil tetap bersaing dengan negara-negara lain dalam menguasai informasi dan pengaruh di ranah digital.

Selain itu, dari sudut pandang realisme, setiap negara akan sangat waspada dalam kerja sama siber dengan negara lain. Meski ada ruang untuk kolaborasi, namun sering kali ketidakpercayaan menghambat kerja sama sepenuhnya, terutama dalam hal berbagi informasi sensitif atau membangun kapabilitas siber bersama. Negara-negara, sebagaimana dalam teori realisme, selalu berhati-hati dan cenderung mempertahankan kemandirian siber agar tidak terlalu bergantung pada negara lain. Ketidakpercayaan ini mengakar dalam pandangan realis bahwa negara harus mengutamakan kepentingannya sendiri dan bahwa setiap interaksi berisiko menjadi alat bagi negara lain untuk memperoleh pengaruh atau akses yang dapat digunakan untuk merusak atau memanfaatkan kelemahan negara tersebut (Clarke & Knake, 2010).

Pada akhirnya, keamanan siber dalam teori realisme adalah tentang mempertahankan kekuatan dan kedaulatan di era digital. Negara berusaha membangun kemampuan pertahanan dan serangan sibernya sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Negara-negara dengan kapabilitas siber unggul

cenderung melihat ranah siber sebagai arena untuk menunjukkan kekuatan, baik untuk melindungi infrastruktur vital maupun sebagai alat penekan yang bisa digunakan dalam situasi konflik. Realisme menekankan bahwa dalam lingkungan internasional yang tidak teratur, kemampuan siber adalah bentuk pertahanan yang krusial dan, sekaligus, sarana untuk memastikan bahwa negara tetap kompetitif dan terlindungi dari segala ancaman, termasuk yang datang dari jaringan tak kasat mata.

3. Perang Dagang

Perang dagang dapat dipahami sebagai suatu bentuk persaingan strategis antara negara-negara yang berusaha memaksimalkan kekuasaan dan kepentingan nasional mereka. Realisme, sebagai salah satu teori utama dalam studi hubungan internasional, menempatkan negara sebagai aktor utama yang selalu bertindak untuk mempertahankan kedaulatan, kekuasaan, dan keamanan. Dalam pandangan ini, dunia internasional dianggap sebagai arena anarkis di mana negara harus bersaing untuk memperoleh sumber daya dan kekuatan. Perang dagang, dengan kata lain, bukan hanya soal persaingan ekonomi, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas, di mana negara-negara menggunakan kebijakan perdagangan untuk memperkuat posisi mereka di panggung global (Mearsheimer, 2001).

Perang dagang terjadi ketika dua atau lebih negara mengenakan tarif atau hambatan perdagangan lainnya untuk menguntungkan kepentingan domestik mereka, sekaligus melemahkan negara pesaing. Dalam konteks realisme, perang dagang sering kali dianggap sebagai cara bagi negara untuk mempertahankan

atau memperbesar kekuatan ekonomi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan posisi politik dan militer mereka. Negara yang merasa terancam oleh kekuatan ekonomi negara lain cenderung menggunakan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Dalam perspektif ini, perdagangan internasional dilihat sebagai sarana untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan global, dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi yang maksimal (Waltz, 1979).

Salah satu contoh paling jelas dari perang dagang dalam perspektif realisme adalah perang dagang antara AS dan China yang semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir. AS, sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia, merasa terancam oleh kebangkitan China sebagai pesaing ekonomi global. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika meluncurkan serangkaian tarif terhadap barang-barang impor dari China sebagai upaya untuk mengurangi defisit perdagangan dan menekan kebijakan industri China yang dianggap merugikan kepentingan Amerika. Dalam pandangan realis, tindakan ini lebih dari sekadar langkah ekonomi; itu adalah strategi geopolitik untuk menghambat pertumbuhan ekonomi China dan mencegah negara tersebut mendapatkan posisi dominasi yang lebih kuat dalam ekonomi global. Sebaliknya, China merespon dengan menerapkan tarif balasan dan memperkuat kebijakan perdagangan domestiknya. Dengan demikian, perang dagang ini bukan hanya sekadar persaingan ekonomi, tetapi juga usaha untuk mempertahankan atau

memperoleh keunggulan dalam keseimbangan kekuatan internasional (Paltiel, 2019).

Dari perspektif realisme, perang dagang juga berfungsi sebagai alat untuk menegaskan kekuasaan dan pengaruh. Negara-negara dengan ekonomi yang kuat dapat menggunakan perang dagang sebagai sarana untuk menekan negara-negara yang lebih lemah atau untuk mengubah aturan perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan mereka. Negara-negara besar seperti AS sering kali memanfaatkan kekuatannya untuk memaksakan kebijakan perdagangan yang menguntungkan mereka, sementara negara-negara yang lebih kecil atau lebih lemah mungkin terpaksa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh negara-negara besar tersebut. Dalam hal ini, perang dagang menjadi instrumen bagi negara untuk mempertahankan posisi dominasi mereka, baik dalam perdagangan maupun dalam politik internasional (Mearsheimer, 2001).

Selain itu, dalam teori realisme, ketergantungan antar negara sering kali dipandang dengan skeptisisme. Negara-negara dalam sistem internasional ini tidak hanya bertindak dalam kerangka hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, tetapi lebih dalam konteks persaingan dan ketidakpercayaan. Dalam dunia yang anarkis, negara tidak dapat bergantung sepenuhnya pada negara lain untuk menjaga kepentingannya, sehingga mereka cenderung untuk mempertahankan otonomi ekonomi dengan cara-cara seperti proteksionisme atau kebijakan perdagangan yang agresif. Keputusan-keputusan ini tidak hanya didorong oleh alasan ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan politis yang berkaitan dengan keamanan dan kekuasaan nasional (Ikenberry, 2002).

Secara keseluruhan, dalam kerangka realisme, perang dagang bukan hanya tentang pertarungan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana negara berusaha untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional yang penuh dengan persaingan. Negara-negara akan menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka, tidak hanya dalam hal keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai tujuan geopolitik yang lebih besar. Dalam dunia yang dipenuhi ketidakpastian dan persaingan ini, perang dagang menjadi salah satu sarana utama bagi negara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana inovasi teknologi 5G oleh Huawei Co. Ltd memengaruhi kebijakan perdagangan telekomunikasi AS terhadap China. Penelitian ini juga memanfaatkan teori hubungan internasional, seperti realisme, untuk mengkaji interaksi antara inovasi teknologi dan kepentingan nasional.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data mencakup jurnal akademik, buku, laporan resmi pemerintah, artikel media terpercaya, dan dokumen-dokumen

terkait kebijakan perdagangan dan inovasi teknologi 5G. Penelusuran data dilakukan melalui akses online dan offline dari berbagai sumber terpercaya.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data yang relevan dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan memadukan konsep kepentingan nasional, keamanan siber, dan perang dagang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pengaruh inovasi teknologi Huawei terhadap kebijakan perdagangan AS.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif dengan fokus pada kajian teoritis dan empiris. Kajian literatur untuk memahami konteks teori dan fakta terkait. Analisis studi kasus untuk mengkaji peran Huawei dalam inovasi teknologi 5G dan dampaknya pada kebijakan perdagangan AS. Pendekatan historis untuk memahami latar belakang hubungan dagang antara AS dan China dalam konteks persaingan teknologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional telah menjadi bagian fundamental dalam studi hubungan internasional sejak era modern awal. Secara historis, akar dari teori ini dapat dilacak kembali pada pemikiran para filsuf politik klasik yang memberikan perhatian besar pada hubungan antara negara dan kekuasaan. Salah satu tokoh paling awal yang membahas kepentingan nasional adalah Niccolò Machiavelli dalam karyanya *The Prince* (1513). Dalam buku ini, Machiavelli mengemukakan bahwa kelangsungan negara dan kekuasaan adalah prioritas utama penguasa. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus menggunakan segala cara, termasuk tindakan yang tidak bermoral, demi melindungi dan memperkuat negara. Pemikiran Machiavelli ini dianggap sebagai landasan awal realisme dalam hubungan internasional.

Pada abad ke-17, pemikiran Thomas Hobbes dalam *Leviathan* (1651) semakin memperkuat gagasan tentang kepentingan nasional. Hobbes memperkenalkan konsep "keadaan alamiah" (state of nature) di mana manusia hidup tanpa hukum dan keamanan, yang menyebabkan kekacauan dan konflik. Menurut Hobbes, negara harus bertindak sebagai kekuasaan absolut untuk menciptakan ketertiban dan melindungi warganya. Dalam konteks ini, kepentingan nasional diidentifikasi sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal.

Pada abad ke-18 dan ke-19, konsep kepentingan nasional mulai berkembang dalam konteks politik kekuasaan di Eropa. Tokoh seperti Otto von

Bismarck menggunakan strategi realpolitik untuk memperkuat negara Jerman, menempatkan kepentingan nasional di atas prinsip moral atau ideologis. Strategi ini menekankan pentingnya pragmatisme dan kalkulasi kekuatan dalam hubungan internasional.

Pada abad ke-20, teori kepentingan nasional mengalami pengembangan signifikan, terutama melalui kontribusi para pemikir realis. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Hans Morgenthau, yang dalam bukunya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (1948), memperkenalkan kepentingan nasional sebagai konsep sentral dalam hubungan internasional. Morgenthau menegaskan bahwa kepentingan nasional harus dilihat melalui lensa kekuasaan, baik dalam bentuk militer, ekonomi, maupun diplomasi. Ia juga menekankan bahwa negara adalah aktor rasional yang selalu bertindak untuk memaksimalkan keamanannya dalam sistem internasional yang anarkis.

Selain realisme klasik, perkembangan teori kepentingan nasional juga dipengaruhi oleh munculnya pendekatan struktural dalam hubungan internasional. Kenneth Waltz, melalui *Theory of International Politics* (1979), memperkenalkan realisme struktural (neorealisme) yang menekankan peran struktur sistem internasional dalam membentuk perilaku negara. Menurut Waltz, negara bertindak untuk mengejar kepentingan nasional mereka, yang didefinisikan oleh posisi mereka dalam sistem internasional. Negara-negara besar cenderung berusaha memaksimalkan kekuasaan untuk mempertahankan status quo atau mencapai dominasi.

Pada era pasca-Perang Dingin, pendekatan konstruktivis menawarkan perspektif baru mengenai kepentingan nasional. Alexander Wendt dalam *Social Theory of International Politics* (1999) berpendapat bahwa kepentingan nasional tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk oleh interaksi sosial, identitas, dan norma internasional. Misalnya, negara-negara yang berbagi nilai-nilai demokrasi cenderung memiliki definisi kepentingan nasional yang serupa, seperti promosi hak asasi manusia atau perdagangan bebas.

Pendekatan liberal juga memberikan kontribusi penting dalam memahami kepentingan nasional. Robert Keohane dan Joseph Nye melalui *Power and Interdependence* (1977) menekankan bahwa kepentingan nasional semakin terkait dengan interdependensi ekonomi dan institusi global. Mereka berpendapat bahwa dalam dunia yang saling terhubung, konflik antarnegara dapat diminimalkan melalui kerja sama ekonomi dan diplomasi multilateral.

Saat ini, teori kepentingan nasional tetap menjadi kerangka utama dalam analisis hubungan internasional, meskipun terdapat perbedaan pendekatan di antara berbagai aliran pemikiran. Realisme masih menjadi landasan utama bagi banyak negara besar, seperti AS, China, dan Rusia, yang memprioritaskan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri mereka. Dalam pendekatan ini, kepentingan nasional sering kali diterjemahkan sebagai upaya untuk memperluas pengaruh geopolitik, mempertahankan keamanan, dan melindungi kedaulatan.

Namun, globalisasi dan tantangan transnasional, seperti perubahan iklim, pandemi, dan keamanan siber, telah mengubah cara pandang terhadap kepentingan nasional. Negara-negara semakin menyadari bahwa masalah-masalah global ini membutuhkan kerja sama internasional untuk diselesaikan. Dalam konteks ini, teori interdependensi Keohane dan Nye kembali relevan, karena menekankan pentingnya koordinasi multilateral dalam menghadapi tantangan bersama.

Konstruktivisme juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana norma internasional memengaruhi definisi kepentingan nasional. Misalnya, tekanan internasional untuk menurunkan emisi karbon telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan hijau sebagai bagian dari kepentingan nasional mereka. Upaya global seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim mencerminkan perubahan paradigma ini.

Di sisi lain, kritik terhadap teori kepentingan nasional juga muncul dari perspektif kritis. Beberapa sarjana berpendapat bahwa konsep ini sering digunakan untuk membenarkan kebijakan luar negeri yang agresif atau tidak adil, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat internasional. Misalnya, perang dagang atau intervensi militer sering kali dilakukan dengan dalih melindungi kepentingan nasional, meskipun dampaknya merugikan komunitas global.

Secara keseluruhan, teori kepentingan nasional terus berevolusi untuk menjawab tantangan dunia modern. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan

untuk mengintegrasikan isu-isu global, seperti keberlanjutan lingkungan dan ketimpangan ekonomi, ke dalam definisi kepentingan nasional. Dengan demikian, negara dapat menjaga kedaulatan mereka sambil berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan internasional.

B. Teori Keamanan Siber

Sejarah keamanan siber bermula dari perkembangan teknologi informasi pada akhir abad ke-20, ketika komputer dan jaringan komunikasi mulai digunakan secara luas. Istilah "keamanan siber" pertama kali mendapatkan perhatian signifikan pada 1990-an, seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung ekonomi modern. Namun, akar konsep ini dapat dilacak lebih jauh ke era Perang Dingin, ketika teknologi komputer digunakan untuk mendukung operasi militer dan intelijen oleh AS dan Uni Soviet.

Pada masa itu, ancaman terhadap informasi bersifat konvensional, seperti spionase elektronik yang bertujuan untuk mengakses rahasia militer dan strategi negara. Peningkatan kemampuan teknologi menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi informasi digital. Salah satu tonggak penting dalam sejarah keamanan siber adalah diterbitkannya Computer Security Act of 1987 di AS. Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap data komputer yang digunakan dalam pemerintahan federal, serta menjadi landasan awal untuk kebijakan keamanan digital yang lebih luas.

Perkembangan selanjutnya terlihat pada awal 2000-an, ketika insiden besar seperti serangan *ILOVEYOU* pada tahun 2000 menunjukkan kerentanan besar dalam jaringan komputer global. Serangan ini menyebabkan kerugian miliaran dolar secara global, meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya keamanan siber tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga sektor swasta.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang semakin kompleks, teori keamanan siber terus mengalami evolusi. Pada awalnya, keamanan siber berfokus pada aspek teknis, seperti pengembangan firewall, antivirus, dan enkripsi untuk melindungi data. Namun, pendekatan ini dengan cepat berkembang untuk mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk manusia, kebijakan, dan strategi nasional.

Singer dan Friedman (2014) mengidentifikasi tiga elemen utama dalam keamanan siber:

- □Teknologi: Aspek teknis meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang dirancang untuk melindungi jaringan dan data.
- □Manusia: Faktor manusia mencakup perilaku pengguna, pelatihan keamanan, dan peran pakar keamanan siber dalam mendeteksi dan merespon ancaman.
- □Kebijakan: Regulasi dan tata kelola yang mengatur penggunaan teknologi informasi secara aman.

Pada dekade berikutnya, konsep keamanan siber semakin dipengaruhi oleh teori hubungan internasional. Teori realisme, misalnya, menekankan

pentingnya kekuatan negara dalam melindungi infrastruktur digitalnya dari ancaman eksternal. Negara dianggap sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk membangun kapabilitas pertahanan siber yang kuat.

Sebaliknya, pendekatan liberal menyoroti pentingnya kerjasama internasional melalui institusi global, seperti Konvensi Budapest, yang menjadi kerangka kerja hukum internasional pertama untuk menangani kejahatan siber. Teori konstruktivis juga memberikan perspektif baru dengan menganalisis bagaimana norma-norma internasional, seperti privasi data dan perlindungan hak digital, membentuk kebijakan keamanan siber di berbagai negara.

Munculnya konsep *cyber deterrence* juga menjadi elemen penting dalam teori keamanan siber modern. Konsep ini diadaptasi dari teori pencegahan militer dan berfokus pada cara negara menggunakan ancaman pembalasan untuk mencegah serangan siber. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Libicki (2009), pencegahan dalam ranah siber memiliki tantangan unik, terutama karena sulitnya mengidentifikasi pelaku serangan secara tepat (attribution problem).

Keamanan siber saat ini menjadi salah satu isu terpenting dalam hubungan internasional. Ancaman siber tidak lagi hanya berasal dari aktor negara tetapi juga dari kelompok kriminal, teroris, dan individu. Negara-negara besar seperti AS, China, dan Rusia telah mengembangkan strategi nasional untuk melindungi infrastruktur kritis mereka, termasuk jaringan listrik, sistem transportasi, dan komunikasi.

Serangan siber berskala besar seperti insiden SolarWinds pada tahun 2020 menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi bahkan pada sistem yang dianggap paling aman sekalipun. Insiden ini memengaruhi ribuan organisasi, termasuk pemerintah dan perusahaan multinasional, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih terpadu untuk keamanan siber.

Kerjasama internasional dalam keamanan siber juga terus berkembang. Konvensi Budapest tetap menjadi acuan utama untuk kerangka hukum internasional terkait kejahatan siber, meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara negara-negara Barat, China, dan Rusia. Di tingkat regional, Uni Eropa telah meluncurkan General Data Protection Regulation (GDPR), yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan memperkuat keamanan informasi di seluruh kawasan.

Namun, tantangan besar tetap ada. Serangan ransomware, pencurian data, dan ancaman terhadap privasi terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi baru seperti AI dan IoT. Selain itu, meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital selama pandemi COVID-19 juga memperbesar risiko serangan siber terhadap individu dan organisasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, teori keamanan siber harus terus berkembang. Pendekatan holistik yang mencakup dimensi teknis, manusia, dan kebijakan diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Selain itu, upaya untuk mengintegrasikan keamanan siber ke dalam strategi nasional dan internasional semakin penting dalam menjaga stabilitas global.

C. Teori Perang Dagang

Konsep perang dagang telah menjadi bagian penting dalam sejarah hubungan internasional, mencerminkan bagaimana negara-negara menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat untuk mencapai kepentingan strategis. Pada masa awal modern, kebijakan merkantilisme menjadi fondasi utama dalam praktik perang dagang. Merkantilisme, yang berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18, menekankan bahwa kekayaan suatu negara diukur dari jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Dalam konteks ini, negara-negara Eropa berusaha memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor untuk menjaga surplus perdagangan.

Salah satu contoh nyata dari perang dagang awal adalah konflik antara Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Kedua negara bersaing untuk menguasai jalur perdagangan maritim dan sumber daya kolonial, yang memicu serangkaian perang yang dikenal sebagai "*Anglo-Dutch Wars*." Perang ini tidak hanya menunjukkan penggunaan kebijakan perdagangan proteksionis tetapi juga menandai awal dari dominasi Inggris dalam perdagangan global.

Pada abad ke-19, dengan munculnya liberalisme ekonomi, konsep perang dagang mulai berubah. Perjanjian perdagangan bebas, seperti *Cobden-Chevalier Treaty* antara Inggris dan Prancis pada tahun 1860, mencerminkan upaya untuk menggantikan proteksionisme dengan kerja sama ekonomi. Namun, proteksionisme tetap muncul kembali selama periode ketidakstabilan ekonomi, seperti selama Depresi Besar pada tahun 1930-an, ketika negara-negara besar

menerapkan tarif tinggi untuk melindungi industri domestik mereka. Kebijakan *Smoot-Hawley Tariff Act* di AS, misalnya, meningkatkan tarif hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu balasan dari mitra dagang dan memperburuk krisis ekonomi global.

Perkembangan teori perang dagang mulai mendapatkan perhatian serius pada abad ke-20. Pada periode pasca-Perang Dunia II, sistem perdagangan internasional yang lebih terintegrasi mulai terbentuk dengan didirikannya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. GATT bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mencegah eskalasi perang dagang yang telah terbukti merugikan selama periode antarperang.

Dalam konteks akademis, para ekonom seperti Jagdish Bhagwati (1982) mengemukakan bahwa perang dagang sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan perdagangan dan konflik kebijakan domestik yang memengaruhi mitra dagang. Bhagwati juga menyoroti dampak negatif perang dagang terhadap efisiensi ekonomi global, seperti meningkatnya biaya produksi dan menurunnya daya saing internasional.

Selain itu, pendekatan teori hubungan internasional mulai digunakan untuk menganalisis perang dagang. Teori realisme memandang perang dagang sebagai alat negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan mereka dalam sistem internasional yang anarkis. Negara menggunakan kebijakan perdagangan untuk memperkuat posisi strategis mereka, sering kali dengan mengorbankan negara lain. Sebaliknya, teori liberal menekankan

pentingnya institusi internasional, seperti *World Trade Organization* (WTO), untuk mengelola konflik perdagangan dan mendorong kerja sama multilateral.

Pada era modern, perang dagang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Persaingan untuk menguasai teknologi strategis, seperti semikonduktor, AI, dan energi terbarukan, telah menjadi elemen kunci dalam perang dagang abad ke-21. Sebagai contoh, perang dagang antara AS dan China yang dimulai pada tahun 2018 bukan hanya dipicu oleh defisit perdagangan tetapi juga oleh upaya untuk membatasi dominasi teknologi China melalui kebijakan tarif dan pembatasan ekspor.

Perang dagang saat ini telah berkembang menjadi isu kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Konflik antara AS dan China tetap menjadi contoh utama perang dagang modern. Pada tahun 2018, pemerintahan Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang China senilai miliaran dolar, yang kemudian direspon dengan langkah serupa oleh China. Konflik ini tidak hanya memengaruhi perdagangan bilateral tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global.

Selain itu, perang dagang mulai mencakup isu-isu lintas sektor, seperti perubahan iklim. Tarif karbon yang diterapkan oleh Uni Eropa adalah contoh bagaimana kebijakan perdagangan digunakan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan. Mekanisme penyesuaian karbon lintas batas *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa bertujuan untuk

mencegah praktik *carbon leakage* dan melindungi industri domestik dari kompetisi asing yang tidak mematuhi regulasi hijau.

Namun, tantangan besar masih ada dalam mengelola perang dagang di era globalisasi. WTO, yang seharusnya menjadi penjaga stabilitas perdagangan internasional, menghadapi kritik atas efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa perdagangan. Di sisi lain, nasionalisme ekonomi yang meningkat di banyak negara telah memperburuk ketegangan perdagangan, mengurangi kemungkinan kerja sama multilateral.

Di luar kerangka negara, aktor non-negara juga memainkan peran penting dalam dinamika perang dagang. Perusahaan multinasional sering kali menjadi target atau alat dalam perang dagang, baik melalui kebijakan tarif maupun pembatasan investasi. Selain itu, masyarakat sipil dan kelompok advokasi semakin vokal dalam menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari perang dagang, mendorong perubahan dalam cara konflik perdagangan dikelola.

Dalam konteks ini, teori perang dagang harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru, termasuk bagaimana menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi global. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif diperlukan untuk mengelola isu-isu baru, seperti dampak teknologi disruptif dan perubahan paradigma dalam perdagangan global.

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan inovasi teknologi 5G dan kebijakan perdagangan internasional. Penelitian-penelitian ini memberikan dasar teoritis dan empiris bagi penelitian ini serta membantu dalam memahami perkembangan yang telah ada. Dengan meninjau penelitian terdahulu, penelitian ini dapat memperoleh wawasan lebih dalam mengenai permasalahan yang diangkat serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat diisi melalui studi ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi 5G menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam berbagai penelitian, terutama terkait dengan dampaknya terhadap geopolitik, ekonomi global, serta keamanan siber. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional yang melibatkan perusahaan teknologi besar, seperti Huawei, juga telah menjadi perhatian utama bagi berbagai negara, khususnya dalam konteks persaingan antara AS dan China. Oleh karena itu, studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai aspek yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai bagaimana teknologi 5G telah berkembang dari aspek teknis, ekonomi, serta politik global. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah membahas bagaimana negara-negara besar menggunakan teknologi 5G sebagai alat untuk

meningkatkan daya saing ekonomi dan pengaruh geopolitik mereka. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti bagaimana kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh berbagai negara mempengaruhi adopsi dan implementasi teknologi 5G di berbagai kawasan dunia.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

No	Judul	Peneliti	Fokus Penelitian
1	<i>"Huawei, 5G, and European Security: Navigating the Dilemmas"</i>	Christensen, B.E. (2019)	Meneliti dampak ekspansi teknologi 5G Huawei terhadap keamanan Uni Eropa serta kebijakan mitigasi yang diambil oleh negara-negara Eropa. Penelitian ini membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap potensi risiko keamanan nasional akibat penggunaan perangkat Huawei dalam infrastruktur telekomunikasi mereka. Studi ini juga menyoroti bagaimana negara-negara di Eropa mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Huawei, termasuk dengan mengembangkan kebijakan yang lebih ketat

			terkait keamanan siber dan infrastruktur telekomunikasi.
2	<i>"The Five Eyes Alliance and the Huawei Dilemma: A Case Study of National Security and Technology Policy"</i>	Herscovitch, B. (2021)	Menganalisis kebijakan pelarangan Huawei oleh negara-negara Five Eyes Alliance dengan menyoroti aspek keamanan nasional dan geopolitik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kerja sama antara AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru dalam menyikapi ancaman yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi Huawei. Kajian ini juga membahas bagaimana keputusan negara-negara ini mempengaruhi kebijakan perdagangan global dan bagaimana mereka berusaha untuk menekan penggunaan teknologi Huawei melalui berbagai sanksi dan regulasi ketat.
3	<i>"Huawei, 5G, and Global Technology Competition"</i>	Jiang, M. & Ling, X. (2020)	Mengkaji persaingan teknologi global dalam pengembangan jaringan 5G serta dampak kebijakan perdagangan AS terhadap Huawei. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan proteksionisme dan sanksi perdagangan yang diterapkan oleh AS

			bertujuan untuk membatasi pengaruh China dalam sektor teknologi tinggi. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak dari kebijakan tersebut terhadap industri teknologi global dan bagaimana negara-negara lain merespon kebijakan yang diterapkan oleh AS terhadap Huawei.
4	<i>"The Hacked World Order: How Nations Fight, Trade, Maneuver, and Manipulate in the Digital Age"</i>	Segal, A. (2020)	Mengulas bagaimana teknologi 5G digunakan sebagai alat dalam persaingan geopolitik antara AS dan China. Studi ini menunjukkan bagaimana inovasi digital telah menjadi bagian penting dalam strategi diplomasi dan perdagangan internasional, serta bagaimana negara-negara besar memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional mereka. Penelitian ini juga membahas bagaimana teknologi digital telah mengubah lanskap politik dan ekonomi global, serta bagaimana negara-negara berlomba-lomba untuk mengamankan keunggulan dalam pengembangan teknologi mutakhir seperti 5G.

5	<i>"Huawei and the Belt and Road: Expanding China's Tech Influence in Asia"</i>	Zhang, W. (2020)	Meneliti bagaimana kebijakan perdagangan China dalam inisiatif Belt and Road dikaitkan dengan ekspansi teknologi Huawei di Asia. Penelitian ini membahas bagaimana Huawei menjadi instrumen utama dalam strategi China untuk memperluas pengaruh teknologinya ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika melalui proyek infrastruktur digital. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana negara-negara di kawasan tersebut merespon ekspansi teknologi Huawei dan bagaimana mereka menyesuaikan kebijakan mereka untuk menghadapi persaingan global dalam sektor telekomunikasi.
6	<i>"Huawei and the Technology Cold War"</i>	Paltiel, J.T. (2019)	Menganalisis perang dagang antara AS dan China dalam konteks persaingan teknologi, terutama dalam implementasi 5G. Studi ini menguraikan bagaimana ketegangan antara kedua negara dalam aspek perdagangan dan teknologi berdampak pada kebijakan global terkait regulasi jaringan 5G. Penelitian ini

			juga menyoroti bagaimana negara-negara lain merespon perang dagang ini dan bagaimana mereka menavigasi hubungan perdagangan mereka dengan AS dan China dalam menghadapi perkembangan teknologi 5G.
--	--	--	--

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai teknologi 5G dan kebijakan perdagangan internasional telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian yang telah membahas dampak geopolitik dari inovasi 5G, serta bagaimana negara-negara merespon kebijakan perdagangan yang membatasi akses terhadap teknologi tertentu. Namun, masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana pengaruh spesifik kebijakan perdagangan AS terhadap ekspansi 5G Huawei dalam konteks ekonomi dan politik global. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi pemahaman yang telah ada dengan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika perdagangan internasional dan inovasi teknologi 5G. Dengan menambahkan dimensi yang lebih luas, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana negara-negara merancang kebijakan mereka untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sambil tetap menjaga keamanan nasional dan stabilitas ekonomi mereka.

